

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media massa merupakan sarana penyebaran informasi berupa berita, opini, komentar, atau hiburan yang disebarluaskan secara masal dan dapat diakses oleh masyarakat luas dengan menggunakan bantuan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Hal ini membuat media massa memiliki peranan yang besar dalam memberikan ide serta informasi pada masyarakat, sangat penting bagi media untuk memaksimalkan peran penting tersebut dalam mengedukasi dan menginformasikan masyarakat mengenai pemberitaan sebelum, saat terjadi, maupun sesudah. Oleh sebab itu, peran media dalam menyampaikan informasi dapat terwujud jika adanya peran dari jurnalis. Jurnalis memiliki peran dalam memproduksi berita, mulai dari mencari sumber pemberitaan hingga menghasilkan pemberitaan. Gagasan mengenai peran jurnalis sangat erat kaitannya dengan konsep dan teori mengenai fungsi dan peran media, sehingga mustahil untuk dapat mengkaji apa dan bagaimana peran jurnalis di tengah masyarakat tanpa mempelajari lebih jauh mengenai perkembangan jurnalisisme melalui pemberitaan-pemberitaan yang disajikan oleh media saat ini.

Melihat pada masa sekarang media massa telah berkembang dengan pesat, banyak perubahan yang terjadi. Berbeda halnya dengan media massa dahulu terutama dalam hal mendapatkan informasi. Dalam mendapatkan informasi atau berita pada zaman dahulu sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh proses dalam mendapatkan informasi mulai dari peliputan, produksi, hingga sampai ke telinga masyarakat memerlukan proses yang cukup panjang. Pada awalnya penyebaran informasi melalui koran cetak yang terjadi akibat hasil dari penemuan mesin cetak oleh Gutenberg pada 1440. Oleh sebab itu pers Dapat disimpulkan bahwa pada zaman dahulu informasi yang ingin disebarluaskan terkendala oleh kemampuan dan teknologi.

Seiring dengan berjalannya waktu teknologi semakin maju dan berkembang pesat, hal ini membuat munculnya media massa baru. Media massa bukan lagi berbentuk cetak berupa koran, melainkan visual berupa gambar dan audio yaitu munculnya radio dan televisi. Media radio dan televisi meski sudah semakin maju dan berkembang dibandingkan dengan cetak, tetapi masih memiliki banyak kekurangan terutama dalam hal kecepatan. Tetapi fungsi pers tetap sama dahulu maupun sekarang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 mengenai pers dalam pasal 3 butir menyebutkan bahwa “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial”. Fungsi pers salah satunya kontrol sosial memiliki peranan dalam “melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum” yang dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 dalam pasal 6 butir d. Hal ini membuat fungsi pers merupakan wujud nyata dari peran dalam mengontrol aparat pemerintahan. Jika pers melanggar peraturan tersebut akan membuka peluang untuk melakukan penyimpang jika dapat disetir oleh kelompok tertentu.

Melihat bagaimana media pada zaman dahulu, membuat jurnalis memiliki peran penuh terhadap pintu gerbang secara keseluruhan (*gatekeeper*). Menurut K. Romli dalam buku Komunikasi Massa (2016) *gatekeeper* merupakan penjaga gerbang dapat diartikan bahwa jurnalis merupakan seseorang yang menentukan pemberitaan seperti apa yang akan tampil dalam masyarakat. Melihat hal tersebut masyarakat dahulu hanya satu arah dalam mendapatkan informasi.

Hal ini membuat sifat dari seorang masyarakat yang menjadi komunikasi satu arah. Untuk itu media atau jurnalis bila ingin mengetahui dampaknya terjadi akan lebih lama dan sulit mendapatkan respons. Komunikasi satu arah yang tercipta memiliki ciri dari komunikasi massa yang tradisional yaitu dari satu entitas atau orang kepada khalayak besar yang tidak ada penghubung sehingga menjadi pasif, dan tidak ada komunikasi massa. Produsen informasi dalam memberitahukan kepada publik tidak mengetahui interaksi terhadap

masyarakat sehingga masyarakat akan sedikit dan jarang yang menanggapi informasi. Oleh sebab itu, bila masyarakat ingin merespons memiliki dorongan yang lebih dan sulit karena harus melakukan hubungan ke media. Hal ini yang membuat masyarakat akan menjadi merasa malas karena belum tentu suara dan respons-nya akan benar tersampaikan.

Menurut aliansi jurnalis independen (AJI) tahun 90-an lahirlah media baru yang dapat menjawab segala kekurangan daripada media terdahulu yaitu media *online*. Media *online* merupakan bentuk nyata dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), yang membawa dampak kepada teknologi informasi. Oleh sebab itu, informasi menggunakan teknologi baru ini dapat cepat tersebar luaskan dan banyak.

Media daring berbeda dengan media tradisional karena sifatnya cepat dalam memberitakan informasi. Selain karena sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat dimana saja dan kapan saja. Media untuk akses tersebut menggunakan telepon pintar yang dibawa oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut lahirlah banyak sekali media *online* di Indonesia contohnya adalah kompas.com, detik.com, kumparan, dan lain sebagainya. Lahirnya berita media *online* ini sebagai bukti nyata perkembangan zaman.

Kemajuan teknologi dan perkembangan media di Indonesia tidak membuat media dapat melanggar kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers terutama pada pasal 1 dan 3. Pasal 1 kode etik jurnalistik berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Serta pasal 3 mengatakan “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah” (Dewan Pers, 2013, p. 291-292).

Setelah melihat perkembangan media dari tradisional hingga sekarang menjadi daring dan peran media massa serta jurnalis. Bagaimana bila peran daripada media sebagai kontrol masyarakat disetir oleh elite politik sehingga menghasilkan pemberitaan yang tidak objektif terutama dalam agenda politik.

Melihat apa yang terjadi pada 2024, Indonesia kembali mengadakan pesta demokrasi serentak. Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat memilih calon pemimpin tingkat pusat hingga daerah. Pada 14 Februari 2024 terjadi Pemilihan Umum memilih presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten atau kota. Selanjutnya, tanggal 27 November diadakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 204.807.222 daftar pemilih tetap (DPT) di Indonesia yang akan merasakan pesta demokrasi. Hal ini membuktikan Samuel Huntington (1993) mengatakan bahwa salah satu bentuk parameter dalam mewujudkan sistem demokrasi adalah dengan mengadakan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pemilihan calon pemimpin pemerintahan diambil dari rakyat dan juga dipilih oleh rakyat.

Sistem Pilkada serentak ini telah dilakukan sebanyak lima kali, akan tetapi yang dilaksanakan tahun 2024 ini merupakan pertama kalinya yang melibatkan seluruh provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia. Dengan demikian, terdapat 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota yang mengadakan Pilkada. Pada masa ini media memiliki peran yang sangat penting terutama dalam memberitakan Pilkada. Media massa harus objektif dan sesuai peraturan yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pasal 47 ayat 1 yang mengatakan “Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (KPU,2008, p.25).

Indonesia memiliki 37 provinsi, terdapat satu daerah yang memiliki daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak. Menurut data yang diambil dari KPU provinsi Jawa Barat dengan DPT terbanyak, terdapat 35.714.901 masyarakat yang akan memilih. Menurut data dari website badan pusat statistik, Jawa Barat merupakan provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia dengan wilayah secara geografis yang memiliki luas wilayah 37.851,11 kilometer persegi, terdapat 50.345.200 orang. Hal ini yang membuat menarik dalam melihat

bagaimana pilkada Provinsi Jawa Barat berlangsung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengumumkan pada tanggal 22 September 2024 menetapkan empat pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2024. Nomor urut pertama didapatkan oleh pasangan Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwi Natarina, nomor urut kedua didapat oleh Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja, nomor ketiga didapat oleh Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie, dan yang terakhir nomor keempat oleh Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Penetapan nomor urut bakal calon Pilgub Jabar dilangsungkan tanggal 23 September 2024. Sehingga informasi mengenai calon pilgub Jawa Barat sangatlah penting dan dicari masyarakat. Hal ini dilakukan, agar dapat memilih pilihan yang tepat dalam agenda politik ini. Pilihan akan siapa Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan memimpin daerah Jabar dalam lima tahun ke depan.

Oleh sebab itu pemberitaan mengenai informasi Pilkada khususnya calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat akan sangat menarik perhatian masyarakat. Dapat dilihat Menurut survei pada tahun 2004 yang dilakukan oleh The Asia foundation lebih dari 90% masyarakat yang menggunakan media sebagai informasi pemilihan umum. Hal ini akan membuat pengaruh yang cukup besar apabila media disalahgunakan untuk menyebarkan informasi akan, serta disetir oleh elite politik (Yusuf, 2011:305).

Media *online* di Indonesia sangatlah banyak jumlahnya, salah satu media *online* terbesar dan menjadi acuan masyarakat di Indonesia dalam mencari informasi adalah *detik.com*. Menurut survei yang dilakukan oleh katadata sebanyak 65% responden mengaku bahwa *detik.com* merupakan media *online* yang dibacanya. Hal ini membuat kemungkinan masyarakat akan mencari dan membaca *detik.com* dalam mencari pemberitaan mengenai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. *Detik.com* memberi fasilitas berupa kanal spesial untuk memberitakan mengenai Pilkada 2024. *detik.com* merupakan media setara nasional. Jawa Barat sendiri memiliki banyak sekali media lokal salah satunya adalah *tribunjabar.id*. *Tribunjabar.id* merupakan media lokal yang mendapatkan penghargaan sebagai surat kabar berbahasa Indonesia terbaik

pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. *Tribunjabar.id* memiliki kanal khusus yaitu KPU dan dapat memilih fokusnya yaitu KPU Jabar. Dapat disimpulkan kedua media tersebut merupakan media *online* yang terkenal di Indonesia.

Alasan peneliti memilih media *detik.com* dan *tribunjabar.id* sebagai objek dalam penelitian untuk membandingkan media yang bertaraf nasional dan regional dalam melakukan pemberitaan mengenai Pilkada Jawa Barat tahun 2024 apakah objektif.

Media dapat dikatakan baik apabila media tersebut mengedepankan nilai-nilai objektivitas dalam menyajikan pemberitaan. Objektivitas memiliki prinsip dasar, tidak mencampurkan pandangan pribadi atau opini seorang wartawan terhadap pelaporan berita. Jurnalis maupun media dalam menyebarkan informasi wajib dilakukan secara faktual, akurat, dan berimbang tanpa dipengaruhi oleh opini, prasangka, atau tekanan dari pihak manapun ini merupakan objektivitas yang dikatakan oleh Dewan Pers. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan media sehingga tidak objektif. Dimana pemilik media mengontrol penuh dalam mengendalikan konten media tersebut sehingga terjadinya pelanggaran dan ditegur oleh komisi penyiaran Indonesia. Salah satu contoh yang MNC TV dalam melakukan siaran iklan Partai Perindo. Terdapat konten siaran yang menyeleweng dari Pasal 71 Ayat (6) SPS KPI tahun 2012 tentang kewajiban program iklan kampanye untuk tunduk peraturan undang-undang serta kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan. Maka dari itu pentingnya media bersikap objektif dalam pemberitaan maupun media itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Media massa merupakan sarana penyebaran informasi yang memiliki peran dan pengaruh yang besar terhadap pembentukan opini masyarakat. Dengan demikian, objektivitas media dalam melakukan pemberitaan sangatlah penting. Bagaimana tingkat objektivitas pemberitaan Pilkada Jawa Barat pada media *detik.com* dan *tribunjabar.id*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Setelah penulis merumuskan masalah yang akan dikaji, berikut ini beberapa pertanyaan penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut.

1. Berapa tingkat objektivitas pemberitaan Pilkada mengenai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada media *detik.com*?
2. Berapa tingkat objektivitas pemberitaan Pilkada mengenai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada media *TribunJabar.id*?
3. Berapa perbandingan tingkat objektivitas pada pemberitaan Pilkada mengenai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada media *detik.com* dan *TribunJabar.id*.

1.4 Tujuan Penelitian

Setelah penulis merumuskan masalah yang akan dikaji, berikut ini beberapa pertanyaan penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut.

1. Memetakan kecenderungan *detik.com* dalam melakukan pemberitaan pilkada khususnya mengenai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
2. Memetakan kecenderungan *TribunJabar.id* dalam melakukan pemberitaan pilkada khususnya mengenai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.
3. Melihat perbandingan tingkat objektivitas pada pemberitaan Pilkada mengenai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada media *detik.com* dan *TribunJabar.id*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menjelaskan serta melihat pengaruh pemberitaan media *online* terhadap agenda politik khususnya pilkada. Dengan demikian, pembaca dapat teredukasi serta kritis dalam membaca pemberitaan pilkada di media *online*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Bukan hanya kegunaan akademis yang ingin difokuskan, melainkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para media dan jurnalis untuk menjaga kualitas berita terutama dalam memberitakan pemberitaan. Agar media tidak condong serta objektif dalam melakukan pemberitaan.

1.5.3 Kegunaan Sosial

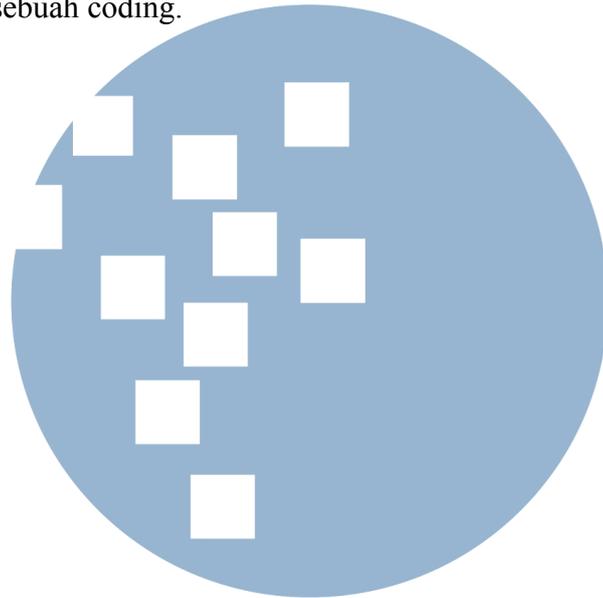
Penelitian ini diharapkan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai pemberitaan khususnya pilkada di media online. Serta membuat masyarakat lebih kritis dalam membaca setiap pemberitaan di media online. Agar tidak terbawa pengaruh apabila sebuah media tidak objektif dalam memberitakan sebuah informasi mengenai calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Beberapa hal yang mungkin akan membatasi proses penelitian ini, diantaranya:

1. Dalam menentukan objektivitas media dalam melakukan pemberitaan Pilkada Jawa Barat, peneliti hanya menggunakan dua media sebagai objek dalam penelitian. Hal ini mungkin masih kurang untuk menggambarkan keadaan secara luas terhadap suatu objektivitas pemberitaan khususnya Pemilu pada media *online* lainnya.

2. Dalam proses pengambilan data, peneliti hanya fokus terhadap pemberitaan yang diterbitkan pada masa kampanye sebelum Pemilu berlangsung. Hal ini kurang mencakup akan apa yang terjadi selama Pilkada Jawa Barat berlangsung.
3. Dalam melakukan pengkodean terjadi kesalahan dalam menginterpretasi menjadi sebuah coding.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA